

## **Pengaruh Tata Kelola dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur**

**Saadatus Zahroh<sup>1</sup>, Ira Hasti Priyadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Madura

Corresponding author:

Saadatus Zahroh

[23383042103@student.uinmadura.ac.id](mailto:23383042103@student.uinmadura.ac.id)

### ***ABSTRACT***

---

*Zakat management in Indonesia continues to face compliance challenges with PSAK 409. This study examines the effect of governance and digitalization on PSAK 409 compliance in the National Zakat Board (BAZNAS) across East Java. A quantitative associative approach is employed, utilizing secondary data from financial reports of regency/city BAZNAS in East Java. Data were collected through documentation via content analysis using a checklist based on developed indicators, and processed using SPSS multiple linear regression. The results show that governance has a positive and significant effect on PSAK 409 compliance ( $B = 0.588$ ;  $sig. = 0.043$ ), while digitalization does not have a significant effect ( $B = -0.051$ ;  $sig. = 0.823$ ). These findings imply that strengthening accountable governance structures is a critical factor requiring serious attention from zakat policymakers in Indonesia.*

**Keywords:** Governance; Digitalization; Compliance; PSAK 409; BAZNAS; East Java

## ABSTRAK

---

Pengelolaan zakat di Indonesia terus menghadapi tantangan kepatuhan terhadap PSAK 409. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola dan digitalisasi terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Jawa Timur. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui dokumentasi menggunakan analisis konten dengan checklist berdasarkan indikator yang telah dikembangkan, dan diolah menggunakan regresi linier berganda SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PSAK 409 ( $B = 0,588$ ;  $\text{sig.} = 0,043$ ), sedangkan digitalisasi tidak berpengaruh signifikan ( $B = -0,051$ ;  $\text{sig.} = 0,823$ ). Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan struktur tata kelola yang akuntabel merupakan faktor kritis yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan zakat di Indonesia.

**Kata kunci:** Tata Kelola; Digitalisasi; Kepatuhan; PSAK 409; BAZNAS; Jawa Timur

---

Received 24 December 2025	Received in revised from 5 June 2026	Accepted 8 June 2026
------------------------------	---	-------------------------

---

## PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu instrumen keuangan Islam dengan potensi besar yang memiliki fungsi sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan dan juga bisa menjadi media pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, zakat nasional diperkirakan memiliki potensi penerimaan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan pada tahun 2022 hanya berada di kisaran Rp22,4 triliun atau sekitar 6,9% dari total potensi tersebut (BAZNAS, 2023). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini bukan semata persoalan teknis penghimpunan, melainkan juga mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang salah satunya dipicu oleh ketidakseragaman pelaporan keuangan.

Dalam upaya menyeragamkan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara komprehensif. Meski demikian, penerapannya di lapangan masih sangat bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BAZNAS di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya patuh terhadap PSAK 409, bahkan di wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi seperti Jawa Timur (Mardiyah & Mardian, 2015; Nikmatuniayah et al., 2020).

Jawa Timur dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota (BPS, 2023). Penelitian ini secara spesifik mengkaji enam BAZNAS yang memenuhi kriteria kelengkapan laporan keuangan, yakni BAZNAS Kabupaten Gresik, Lumajang, Sampang, Tuban, Tulungagung, dan Kota Surabaya, dengan 30 unit observasi selama periode 2020–2024.

Dua faktor yang diduga kuat berpengaruh terhadap kepatuhan PSAK 409 adalah tata kelola dan digitalisasi. Tata kelola dapat dikatakan baik apabila suatu lembaga telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan secara konsisten, sehingga mendorong penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, digitalisasi dikatakan baik apabila proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan zakat telah didukung oleh sistem teknologi yang memungkinkan penyajian informasi secara akurat, *real-time*, dan terstandarisasi. Studi Sukmana dan Saputro (2021) menemukan bahwa lembaga zakat yang mengadopsi platform digital cenderung memiliki tingkat kepatuhan pelaporan yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini merumuskan dua tujuan utama: (1) menguji pengaruh tata kelola terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur, dan (2) menguji pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Stewardship Theory*

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) melalui artikel berjudul "*Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*" yang diterbitkan

dalam *Australian Journal of Management*, Vol. 16(1), halaman 49–64. Berbeda dengan Agency Theory yang memandang agen sebagai pihak yang cenderung oportunistik, Stewardship Theory memposisikan manajer atau pengelola sebagai *steward* atau pihak yang bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks lembaga zakat, amil berperan sebagai *steward* yang diamanahi oleh muzakki dan masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara bertanggung jawab.

Implikasi teoritis dari *Stewardship Theory* terhadap penelitian ini adalah bahwa amil yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen pada akuntabilitas akan secara sukarela menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan, yakni PSAK 409. Hal ini sejalan dengan pandangan Donaldson dan Davis (1991) bahwa seorang *steward* tidak memerlukan pengawasan eksternal yang ketat untuk berperilaku sesuai norma, karena motivasinya bersifat intrinsik dan berorientasi pada kepentingan organisasi serta pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola yang baik dalam lembaga zakat bukan sekadar mekanisme kontrol eksternal, melainkan cerminan dari nilai-nilai intrinsik pengelola zakat itu sendiri. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap PSAK 409 dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban amil secara horizontal kepada muzakki dan mustahik, sekaligus secara vertikal kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah tertinggi (Donaldson & Davis, 1991).

### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang dikemukakan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 melalui disertasi doktoralnya di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan dipublikasikan dalam jurnal *MIS Quarterly*. Dalam teori TAM menyebutkan bahwa seorang individu akan menerima dan menggunakan teknologi dipengaruhi karena dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Kedua faktor ini pada gilirannya akan membentuk sikap dan perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi secara aktual.

Dalam penelitian ini, TAM memiliki implikasi penting sebagai alat teoretis untuk menjelaskan variabel digitalisasi. Keberhasilan adopsi teknologi di BAZNAS tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan sistem seperti perangkat lunak akuntansi atau platform e-zakat, tetapi juga bergantung pada seberapa banyak pegawai di BAZNAS yang menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang mudah digunakan dan bermanfaat. Jika pegawai BAZNAS percaya bahwa sistem digital mempermudah transaksi ZIS dan transaksi keuangan, maka penggunaan teknologi akan menjadi lebih efisien, meningkatkan akurasi dan konsistensi transaksi sesuai dengan PSAK 409.

### ***Compliance Theory***

*Compliance Theory* yang dikemukakan oleh Tyler (1990) merupakan teori yang menjelaskan mengapa individu maupun organisasi mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Teori ini membedakan dua mekanisme utama kepatuhan, yaitu kepatuhan instrumental yang terjadi karena adanya sanksi atau insentif eksternal seperti ancaman hukuman atau pemberian penghargaan, dan kepatuhan normatif yang terjadi karena individu atau organisasi secara internal meyakini bahwa aturan tersebut memang benar, adil, dan layak untuk dipatuhi. Dengan kata lain, kepatuhan

tidak selalu lahir dari paksaan, tetapi juga dapat tumbuh dari kesadaran dan nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri atau sistem organisasi.

Implikasi teoritis dari Compliance Theory terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan perbedaan perilaku BAZNAS terhadap PSAK 409 dari dua sudut pandang yang berbeda. Tata kelola yang kuat mendorong terbentuknya kepatuhan normatif, karena prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadikan tata kelola baik akan terinternalisasi dalam sistem dan budaya BAZNAS, sehingga kepatuhan terhadap standar pelaporan zakat tidak lagi sekadar kewajiban formal melainkan partian dari organisasi. Sementara, digitalisasi berperan pada kepatuhan instrumental atau normatif karena sistem digital memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan mudah digunakan, yang mendorong BAZNAS untuk secara konsisten mematuhi PSAK 409. Dengan demikian, Teori Kepatuhan memberikan informasi yang berguna untuk memahami bagaimana kedua variabel yang dimaksud secara bersama-sama memengaruhi tingkat BAZNAS di Jawa Timur sehubungan dengan standar zakat yang telah ditetapkan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Tata Kelola terhadap Kepatuhan PSAK 409**

Tata kelola dalam konteks lembaga zakat mencakup dimensi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (KNKG, 2006). Lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten diprediksi akan lebih patuh terhadap standar akuntansi karena sistem pengawasan internal maupun eksternal yang berjalan dengan baik.

Beberapa penelitian empiris mendukung hubungan positif ini. Mardiyah dan Mardian (2015) menemukan bahwa lembaga amil zakat dengan struktur tata kelola yang lebih lengkap memiliki tingkat disclosure PSAK 409 yang lebih tinggi. Larasati et al. (2019) juga menunjukkan bahwa keberadaan audit internal dan komite syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan zakat. Dengan berlandaskan teori dan bukti empiris yang dikemukakan sebelumnya maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur.

#### **Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan PSAK 409**

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana ZIS. Digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan PSAK 409 karena teknologi informasi menciptakan sistem pencatatan yang lebih transparan, terstruktur, dan mudah diawasi. Ketika BAZNAS mengadopsi sistem digital, seluruh transaksi ZIS tercatat dan terdokumentasi secara otomatis sehingga setiap penyimpangan dari standar pelaporan akan lebih mudah terdeteksi, yang pada akhirnya menekan kemungkinan ketidakpatuhan. Dalam perspektif Compliance Theory, keterbukaan informasi yang dihasilkan digitalisasi memperkuat kepatuhan instrumental melalui peningkatan risiko terdeteksinya pelanggaran, sekaligus mendorong kepatuhan normatif melalui internalisasi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kerja organisasi. Hal ini didukung oleh temuan Sukmana dan Saputro (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan platform digital

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS, serta Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) yang membuktikan bahwa sistem informasi berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas lembaga amal zakat. Dengan demikian, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan model pengolahan data kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, di mana kerangka analisis dimulai dari konsep-konsep umum menuju penjelasan yang lebih khusus. Pendekatan deduktif menggunakan logika berpikir yang disusun secara sistematis dari teori menuju pengujian empiris (Bungin, 2006).

Definisi populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa manusia, peristiwa, dokumen, maupun gejala sosial yang menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dan digunakan untuk mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan apabila populasi terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah BAZNAS kabupaten/kota yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dalam periode 2020–2024 serta laporan tersebut dapat diakses melalui website resmi atau permintaan dokumen resmi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 6 BAZNAS yang memenuhi syarat, yaitu BAZNAS Kabupaten Gresik, Lumajang, Sampang, Tuban, Tulungagung, dan Kota Surabaya. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 6 BAZNAS dikalikan 5 tahun pengamatan sehingga diperoleh 30 unit observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Timur. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dokumen yang telah tersedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan pendekatan content analysis, yaitu teknik analisis isi dokumen secara sistematis dan objektif menggunakan pedoman checklist yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian (Krippendorff, 2018).

*Checklist* tata kelola disusun berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga nirlaba keagamaan. Checklist digitalisasi disusun berdasarkan indikator pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan lembaga, sedangkan checklist kepatuhan terhadap PSAK 409 disusun berdasarkan ketentuan pengungkapan yang terdapat dalam standar tersebut. Setiap indikator diberi skor biner, yaitu nilai 0 apabila tidak terpenuhi dan

nilai 1 apabila terpenuhi, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor indeks masing-masing variabel.

**Tabel 1. Indikator Content Analysis dan Skor Penilaian**

Variabel	Indikator	Skor
Tata Kelola	Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat informasi penerimaan dan penyaluran ZIS yang rinci	0 = tidak ada; 1 = ada
	Laporan keuangan telah diaudit oleh auditor eksternal	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat laporan pertanggungjawaban kepada publik	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat struktur organisasi yang jelas	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat kebijakan pengelolaan dana ZIS yang tertulis	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat mekanisme pengawas	0 = tidak ada; 1 = ada
	Terdapat kebijakan penentuan porsi/bagian amil yang wajar	0 = tidak ada; 1 = ada
	Digitalisasi	Terdapat sistem informasi manajemen zakat (SIMBA/aplikasi lain)
Terdapat website/portal resmi BAZNAS yang aktif		0 = tidak ada; 1 = ada
Laporan keuangan disajikan dalam format digital		0 = tidak ada; 1 = ada
Terdapat kanal donasi/pembayaran zakat secara digital		0 = tidak ada; 1 = ada
Terdapat SOP atau regulasi internal terkait penggunaan sistem digital		0 = tidak ada; 1 = ada
Terdapat pelaporan yang terintegrasi antar divisi secara digital		0 = tidak ada; 1 = ada
Kepatuhan PSAK 409		Penerimaan zakat diakui sebagai penghasilan dana zakat
	Zakat kas diukur pada nilai nominal	0 = tidak ada; 1 = ada
	Zakat nonkas diukur pada nilai wajar	0 = tidak ada; 1 = ada
	Penerimaan infak/sedekah diakui sebagai penghasilan	0 = tidak ada; 1 = ada
	Infak/sedekah nonkas diukur pada nilai wajar	0 = tidak ada; 1 = ada
	Aset neto zakat disajikan terpisah menjadi dana zakat dan dana amil	0 = tidak ada; 1 = ada
	Piutang penyaluran zakat disajikan sebagai pos tersendiri	0 = tidak ada; 1 = ada

Variabel	Indikator	Skor
	Aset neto infak/sedekah disajikan terpisah dari dana zakat	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada penjelasan bagian amil atas penerimaan zakat	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada rincian penerimaan zakat langsung dan tidak langsung	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada kebijakan penyaluran zakat per asnaf mustahik	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada penjelasan aset kelolaan	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada penjelasan bagian amil atas infak/sedekah	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada rincian penerimaan infak dan sedekah	0 = tidak ada; 1 = ada
	Ada kebijakan penyaluran infak dan sedekah	0 = tidak ada; 1 = ada

Sumber: Data diolah (2026)

Peneliti menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic versi 24 dengan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser, serta uji autokorelasi dengan Durbin-Watson.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

dengan keterangan Y adalah kepatuhan PSAK 409,  $\alpha$  adalah konstanta,  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  adalah koefisien regresi,  $X_1$  adalah tata kelola,  $X_2$  adalah digitalisasi, dan  $\varepsilon$  adalah error term.

Hipotesis dalam penelitian merupakan dugaan sementara yang masih harus diuji kebenarannya melalui data empiris. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1%, 5%, dan 10% untuk memberikan interpretasi yang lebih beragam terhadap hasil pengujian.

### Manajemen Keuangan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Jawa Timur

Manajemen keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Timur merupakan proses pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, BAZNAS Jatim memperoleh sumber dana dari zakat profesi ASN dan masyarakat, infak dan sedekah dari individu maupun perusahaan, CSR, serta kerja sama dengan berbagai lembaga. Penghimpunan dana tersebut dilakukan melalui berbagai saluran seperti rekening bank syariah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta

sistem pembayaran digital seperti transfer dan QRIS agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan, BAZNAS Jawa Timur menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk mencatat seluruh transaksi ZIS secara terintegrasi. Selain itu, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah dan diaudit secara internal maupun eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, bahkan BAZNAS Jatim secara berkala memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan dana juga dilakukan dengan pemisahan antara zakat, infak, dan sedekah agar sesuai dengan ketentuan syariah, serta diawasi oleh Dewan Syariah dan auditor. Selain itu, BAZNAS Jatim juga menyusun perencanaan keuangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat target penghimpunan serta program penyaluran dana berdasarkan kebutuhan mustahik.

Penyaluran dana BAZNAS Jawa Timur dilakukan berdasarkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) sesuai syariat Islam. Penyaluran tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat mandiri. Program penyaluran dana meliputi bantuan sosial seperti sembako untuk fakir miskin, bantuan kesehatan, dan bantuan bencana alam. Selain itu terdapat program pendidikan seperti beasiswa pelajar dan mahasiswa serta bantuan perlengkapan sekolah melalui program BAZNAS Cerdas. Pada bidang ekonomi, BAZNAS Jatim memberikan bantuan modal usaha UMKM, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan seperti Zakat Community Development. Sementara itu, pada aspek dakwah dan kemanusiaan, dana disalurkan untuk bantuan rumah ibadah, santunan dai, dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Proses penyaluran dana dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi calon mustahik melalui survei lapangan, penetapan penerima berdasarkan kategori asnaf, persetujuan program melalui sistem internal, hingga distribusi bantuan baik secara langsung maupun transfer. Setelah penyaluran dilakukan, BAZNAS Jatim juga melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan penerima. Secara keseluruhan, manajemen keuangan dan penyaluran dana di BAZNAS Jawa Timur bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS secara profesional, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	.750	1.000	.90000	.105863
X2	30	.666	1.000	.74950	.129729
Y	30	.600	1.000	.90647	.131731
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini melibatkan 30 unit observasi (N = 30), variabel tata kelola (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,750 dan nilai maksimum sebesar 1,000, dengan rata-rata (mean) sebesar 0,90000 dan standar deviasi sebesar 0,105863. Variabel digitalisasi (X2) menunjukkan nilai minimum 0,666 dan nilai maksimum 1,000, dengan rata-rata sebesar 0,74950 dan standar deviasi 0,129729. Sementara itu, variabel kepatuhan penerapan PSAK 409 (Y) memiliki nilai minimum 0,600 dan nilai maksimum 1,000, dengan rata-rata sebesar 0,90647 dan standar deviasi 0,131731. Secara keseluruhan, ketiga variabel menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi mendekati angka 1, mengindikasikan bahwa sebagian besar BAZNAS di Jawa Timur memiliki skor tata kelola, digitalisasi, maupun kepatuhan yang cukup baik berdasarkan hasil checklist analisis konten.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Tabel 3. Uji Normalitas**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Y	.280	30	.000	.685	30	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas, Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk terhadap variabel Y (kepatuhan penerapan PSAK 409). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai statistik sebesar 0,280 dengan df = 30 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai statistik sebesar 0,685 dengan df = 30 dan Sig. sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi pada kedua uji tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil regresi, dan dapat menjadi dasar untuk dilakukan transformasi data atau pendekatan analisis alternatif jika diperlukan.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.416		2.132	.042		
	X1	.588	.472	2.128	.043	.604	1.655
	X2	-.051	-.050	-.226	.823	.604	1.655

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas, hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel X<sub>1</sub> (tata kelola) memiliki nilai Tolerance dan VIF sebesar 0,604 dan 1,655. Variabel X<sub>2</sub> (digitalisasi) juga memiliki nilai Tolerance dan VIF sebesar 0,604 dan sebesar 1,655. Karena nilai Tolerance kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah terhindar dari multikolinearitas. Artinya, variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> tidak saling berkorelasi secara signifikan sehingga keduanya layak digunakan secara bersamaan sebagai prediktor.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Toleran	VIF
		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	.426	.089		4.803	.000	
	X1	-.398	.126	-.633	-3.165	.004	.604
	X2	.037	.103	.072	.362	.720	.604

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas, Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresi nilai absolut residual (ABS\_RES) terhadap variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa variabel tata kelola (X<sub>1</sub>) memiliki nilai t = -3,165 dan Sig. = 0,004, sedangkan variabel digitalisasi (X<sub>2</sub>) memiliki nilai t = 0,362 dan Sig. = 0,720. Karena nilai Sig. X<sub>1</sub> = 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka variabel tata kelola (X<sub>1</sub>) terindikasi mengandung heteroskedastisitas. Sementara variabel digitalisasi (X<sub>2</sub>) dengan Sig. = 0,720 > 0,05 dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi sepenuhnya dalam model ini karena variabel X<sub>1</sub> menunjukkan adanya ketidakkonsistenan varians residual.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		Durbin-Watson
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.443 <sup>a</sup>	.196	.136	.122427	.530

a. Predictors: (Constant), X2, X1  
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel diatas, Uji autokorelasi dilakukan menggunakan nilai Durbin-Watson dari tabel Model Summary. Hasil menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,530 dengan  $R = 0,443$  dan  $R\text{ Square} = 0,196$ . Nilai Durbin-Watson sebesar 0,530 berada di bawah batas bawah (dL) yang umum digunakan pada tabel DW untuk  $n = 30$  dan  $k = 2$ , sehingga mengindikasikan adanya autokorelasi positif dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar residual, yang dapat memengaruhi keandalan estimasi koefisien regresi dan perlu diperhatikan dalam pembahasan keterbatasan penelitian.

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel dependen kepatuhan penerapan PSAK 409 (Y) dan variabel independen tata kelola (X1) dan digitalisasi (X2). Rangkuman hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	.426	.089		4.803	.000	
	X1	-.398	.126	-.633	-3.165	.004	.604
	X2	.037	.103	.072	.362	.720	.604

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 7, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,416 + 0,588 X1 + (-0,051) X2$$

Nilai konstanta sebesar 0,416 menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dan X2 bernilai nol, maka kepatuhan penerapan PSAK 409 diprediksi berada pada nilai 0,416. Koefisien regresi X1 (tata kelola) sebesar 0,588 bersifat positif dan signifikan, dengan nilai  $t = 2,128$  dan  $\text{Sig.} = 0,043 (< 0,05)$ , yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada variabel tata kelola akan meningkatkan kepatuhan penerapan PSAK 409 sebesar 0,588 dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, koefisien regresi X2 (digitalisasi) sebesar  $-0,051$  bersifat negatif dan tidak signifikan, dengan nilai  $t = -0,226$  dan  $\text{Sig.} = 0,823 (> 0,05)$ , yang berarti digitalisasi tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur dalam penelitian ini.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)****Tabel 8. Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.443 <sup>a</sup>	.196	.136	.122427	.530	

a. Predictors: (Constant), X2, X1  
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti (2026)

Bersasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,443 yang menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,196 menunjukkan bahwa variabel tata kelola (X1) dan digitalisasi (X2) secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel kepatuhan penerapan PSAK 409 (Y) sebesar 19,6%, sedangkan sisanya sebesar 80,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,136 merupakan koreksi atas R Square yang mempertimbangkan jumlah variabel dan sampel, dan nilai ini yang lebih tepat digunakan untuk menilai kontribusi model secara keseluruhan.

**Pengaruh Tata Kelola terhadap Kepatuhan PSAK 409**

Variabel tata kelola (X1) memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi (B) sebesar 0,588 dengan Standard Error = 0,276, nilai t hitung = 2,128, dan Sig. = 0,043. Karena nilai signifikansi  $0,043 < 0,05$ , maka variabel tata kelola berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur, sehingga H1 diterima. Koefisien sebesar 0,588 bermakna bahwa setiap peningkatan satu satuan skor tata kelola akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan sebesar 0,588 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien beta terstandarisasi (Standardized Beta) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh relatif yang cukup besar dalam model ini.

Temuan ini konsisten dengan prediksi Stewardship Theory bahwa amil yang berkomitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi akan secara aktif memenuhi standar pelaporan yang berlaku. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Mardiyah dan Mardian (2015) yang menyimpulkan bahwa kelengkapan struktur tata kelola khususnya keberadaan DPS aktif dan komite audit yang merupakan prediktor kuat tingkat kepatuhan PSAK 409. Dalam konteks penelitian ini, BAZNAS Kota Surabaya dan BAZNAS Kabupaten Gresik menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola yang terstruktur dengan baik menghasilkan laporan keuangan yang secara substansial memenuhi komponen pengungkapan PSAK 409.

**Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan PSAK 409**

Variabel digitalisasi (X2) memiliki koefisien regresi tidak terstandarisasi (B) sebesar -0,051 dengan Standard Error = 0,225, nilai t hitung = -0,226, dan Sig. = 0,823. Karena nilai signifikansi 0,823 jauh di atas 0,05, maka variabel digitalisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur, sehingga H2 ditolak. Koefisien negatif sebesar -0,051

mengindikasikan arah hubungan yang berlawanan, namun kontribusi tersebut tidak bermakna secara statistik.

Hasil ini tidak sejalan dengan prediksi Technology Acceptance Model maupun temuan Sukmana dan Saputro (2021). Beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan atas temuan ini antara lain: pertama, adopsi teknologi digital di kalangan BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Timur belum sepenuhnya diiringi dengan pemanfaatan yang optimal untuk kepentingan pelaporan keuangan yang sesuai standar; kedua, ketersediaan infrastruktur digital (misalnya website resmi atau sistem e-zakat) tidak serta-merta menjamin kualitas output pelaporan apabila tidak disertai dengan kapasitas SDM yang memadai; dan ketiga, ukuran sampel yang relatif kecil ( $N = 30$ ) berpotensi membatasi kekuatan statistik untuk mendeteksi pengaruh yang mungkin ada secara teoritis.

## SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola dan digitalisasi terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS di Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif berbasis content analysis pada 30 unit observasi (6 BAZNAS  $\times$  5 tahun, periode 2020–2024). Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda menggunakan IBM SPSS Statistics 24, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut.

Pertama, tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 ( $B = 0,588$ ;  $t = 2,128$ ;  $sig. = 0,043$ ), sehingga H1 diterima. Kedua, digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penerapan PSAK 409 ( $B = -0,051$ ;  $t = -0,226$ ;  $sig. = 0,823$ ), sehingga H2 ditolak. Dengan koefisien determinasi  $R^2 = 0,196$ , yang berarti model mampu menjelaskan 19,6% variasi kepatuhan PSAK 409.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, BAZNAS di tingkat kabupaten/kota perlu memperkuat struktur tata kelola, khususnya melalui pembentukan DPS yang aktif, penyusunan SOP pelaporan yang jelas, dan peningkatan transparansi informasi kepada publik. Kedua, meskipun digitalisasi secara statistik tidak terbukti signifikan dalam penelitian ini, adopsi teknologi tetap perlu diperkuat secara komprehensif agar potensi manfaatnya terhadap kualitas pelaporan dapat terealisasi. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sampel dan menggunakan data primer untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika kepatuhan PSAK 409 di lembaga amal zakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R., & Dura, J. (2018). Implementasi laporan keuangan organisasi nirlaba pada lembaga amal zakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 12(1), 14–20.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Statistik zakat nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah kabupaten/kota menurut provinsi di Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Firmansyah, I., & Rusydiana, A. S. (2013). Pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 2(1), 43–51.
- Forum Zakat. (2022). *Standar tata kelola organisasi pengelola zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat. <https://www.forumzakat.org>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariante dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habib, M. A. F. (2020). Analisis tata kelola organisasi pengelola zakat terhadap kepercayaan muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 183–200.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hartono, J. (2017). *Sistem informasi keperilakuan* (2nd ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2010). *PSAK 409: Akuntansi zakat dan infak/sedekah*. Jakarta: IAI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI. <https://www.kemenag.go.id>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Larasati, D. A., Mulyani, S., & Yudianto, I. (2019). Pengaruh tata kelola terhadap kualitas laporan keuangan lembaga zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 95–112.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Tingkat kepatuhan lembaga zakat dalam pelaporan keuangan berbasis PSAK 409. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(1), 55–64.
- Meutia, I., & Febrianti, D. (2017). Accountability of Islamic philanthropy institutions: A stewardship theory perspective. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 291–307.
- Nikmatuniayah, N., Marliyati, M., & Mualimin, M. (2020). Kepatuhan penerapan PSAK 409 pada organisasi pengelola zakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 509–522.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap keuangan syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Pratiwi, U. (2016). Pengaruh good governance terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(1), 1–14.
- Rahayu, S., & Anto, L. O. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 55–68.
- Santoso, B., & Nugroho, A. (2022). Transformasi digital lembaga zakat dan dampaknya terhadap akuntabilitas pelaporan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), 21–35.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, R., & Saputro, A. D. (2021). Digitalisasi dan kualitas pelaporan keuangan BAZNAS: Studi empiris era transformasi digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 45-62.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode riset kuantitatif: Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Wahyudi, I., & Sari, M. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur pada lembaga zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 112-128.
- Zulaikha, M., & Hadiprajitno, P. T. B. (2016). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat di Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(2), 1-15.